

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu negara yang melimpah akan potensi alam baik pertanian maupun peternakan adalah negara Indonesia. Negara Indonesia disebut juga sebagai negara maritim dan termasuk negara agraris, karena bidang pertanian menjadi komoditi pangan utama dalam kehidupan Masyarakat Indonesia. Komoditi hasil pertanian sangat berperan penting bagi perekonomian nasional. Konsep Pembangunan pada pertanian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan status ekonomi para petani. Namun, faktanya Indonesia yang merupakan negara sedang berkembang, masih mengalami kendala khususnya di bidang pangan (Lase & Lestari, 2020). Sebelumnya Indonesia pernah meraih predikat swasembada pangan pada tahun 1984 – 1986 di tengah konsumsi nasional pada saat itu hanya 25 juta ton dan terdapat surplus atau penurunan 2 juta ton, sebelum sekarang menjadi negara pengimpor beras. Namun semenjak tahun 2000 Indonesia tercatat tidak pernah absen dalam mengimpor beras. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan *stock* beras Indonesia (Feby Musti Ariska, 2021). Hingga saat ini Indonesia masih sangat sulit untuk berhenti mengimpor komoditas pangan, karena produksi untuk memenuhi konsumsi dalam negeri masih belum mencukupi. Usaha untuk menghentikan keran impor beras di Indonesia sebaiknya mulai dirancangan. Selain itu, Indonesia juga dituntut untuk memaksimalkan bidang pertanian untuk memproduksi makanan olahan. Usaha dalam mempercepat atau mensukseskan program ketahanan pangan menjadi realitas (Kotler & Keller, 2011).

Data menyebutkan dari tahun 2018 – 2022 selalu mengalami penurunan hasil panen dari 15,790 hektar sampai 10,657 hektar. Salah satu faktor pemicu turunnya luas panen padi adalah alih fungsi lahan, tingginya curah hujan serta ada juga yang dialihkan untuk beberapa komoditas lainnya. Meskipun luas panen mengalami penurunan, produksi beras dalam 5 tahun terakhir pun juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017 – 2018. Tetapi pada tahun 2019 ke tahun

2020 mengalami peningkatan pada produksi beras dan tidak menutup kemungkinan Indonesia melakukan kegiatan impor. Namun peningkatan produksi beras tersebut juga diikuti dengan peningkatan konsumsi beras yang berfluktuasi setiap tahunnya. Meskipun menduduki posisi ketiga sebagai penghasil beras terbesar di dunia, pada kenyataannya Indonesia tetap melakukan kegiatan impor beras. Terbukti sejak zaman orde lama dan orde baru Indonesia selalu impor beras meskipun pada waktu itu Indonesia pernah menjadi swasembada beras. Dalam hal impor beras, pemerintah memang memiliki kendali serta melakukan beberapa kebijakan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/2018 tentang ketentuan ekspor dan impor beras. Pemerintah kerap menggantungkan kegiatan impor beras dengan alasan sebagai kebutuhan untuk menambah cadangan beras di dalam negeri dan memperolehnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga beras dalam negeri. Selain sebagai cadangan dalam negeri, yang membuat pemerintah melakukan impor beras adalah terjadinya defisit beras di beberapa provinsi yang disebabkan karena penyaluran pasokan beras yang terhambat dan luasan panen sawah yang menurun dikarenakan cuaca ekstrim. Defisit beras terjadi di provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Sebagian Papua Barat dan Papua. Defisit tersebut juga disebabkan permintaan dan konsumsi beras di dalam negeri yang terlalu tinggi. Perbandingan antara harga beras di Indonesia dengan Thailand dan Vietnam yang merupakan eksportir beras ke Indonesia terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dapat dilihat bahwa harga beras di Indonesia cukup tinggi dan harga beras impor jauh lebih murah dibandingkan Hal tersebut menjadikan alasan pemerintah melakukan impor beras (Darwanto & Rahayu, 2017).

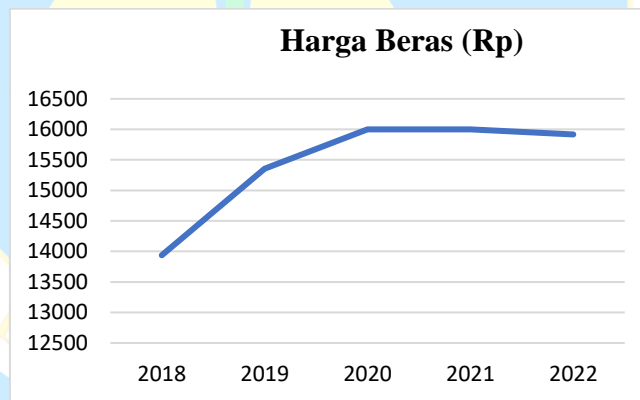
Dikutip dari CNBC, Pada tahun 2018 Indonesia mengimpor beras 2.253.834 ton setara dengan US\$ 1.037 juta. Usai naik drastis, jumlah beras yang diimpor pemerintah Kembali menurun pada 2019, sepanjang 2019 Indonesia mengimpor beras sebanyak 44.508 ton atau setara dengan US\$ 184, 2 juta. Hingga 2022, impor beras era Jokowi bercokol di kisaran level 300 – 400 ton. Pada 2018 sekitar 134 ton beras sisa impor tahun 2018 menumpuk digudang PERUM BULOG. Penumpukan ini juga menimbulkan banyak

keriuhan mengenai carut – marut data antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian Bulog, serta Kementrai Perdagangan terkait stok beras dan panen (CNBC, 2023).

Pada 2018 Budi Waseso menjelaskan keputusan impor beras sebanyak 1,8 juta ton karena cadangan beras pemerintah di Bulog tersisa 600 ribu ton. Jumlah itu kurang karena bulog harus menyalurkan bantuan sosial (bansos) Beras Sejahtera (rastra). Persoalan lainnya, Bulog harus membiayai impor beras itu dengan dana pinjaman dengan bunga tinggi mencapai Rp. 282 Miliar per bulan (CNN, 2021).

Provinsi Kepulauan Riau termasuk kedalam salah satu Provinsi yang mengalami defisit beras sehingga terjadinya ketidakstabilan harga pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Dibawah ini hasil data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau terkait harga beras 5 tahun terakhir periode 2018 – 2022.

Gambar 1.1. Grafik Kenaikan Harga di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 - 2022



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Dari gambar diatas dapat dilihat kenaikan harga yang sangat signifikan, mulai dari harga terendah di tahun 2018 yaitu Rp. 13.937, pada tahun 2019 yaitu Rp. 15.356, pada tahun 2020 dan 2021 dengan harga tertinggi yaitu Rp. 16.000, kemudian di tahun 2022 dengan harga Rp. 15.917.

Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan pangan yang mencukupi, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat untuk mengakses

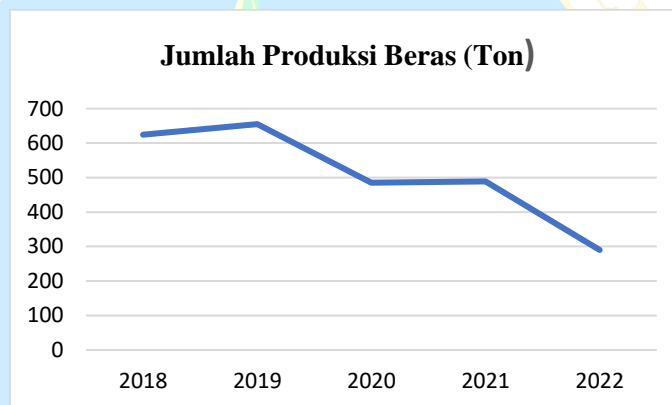
pangan, serta tidak adanya ketergantungan pangan kepada Negara lain ataupun pihak yang lainnya. Merujuk pada keadaan pangan serta pertanian Indonesia, pada saat ini semakin banyak kegiatan pengalihan lahan pertanian yang mengakibatkan jumlah hasil pertanian Indonesia semakin mengalami penurunan di setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung terhadap terjadinya peristiwa kekurangan pangan di Indonesia, yang pada akhirnya mengakibatkan Indonesia harus melakukan impor bahan pangan melalui negara lain demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. Indonesia memutuskan untuk bergabung ke dalam keanggotaan FAO, untuk melakukan kerjasama demi menangani berbagai permasalahan yang terjadi terkait pangan dan pertanian di Indonesia. FAO sangat berperan aktif dalam melakukan berbagai kontribusinya di Indonesia dengan membentuk berbagai program, proyek, serta memberikan bantuan berupa tenaga ahli pada bidang pangan dan pertanian bagi Indonesia. Sejak bergabungnya Indonesia ke dalam keanggotaan FAO, telah banyak proyek yang dijalankan oleh FAO di Indonesia. *Food and Agricultural Organization* (FAO) adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki tugas dan berfokus pada sektor pertanian dan pangan. Indonesia merupakan salah satu anggota FAO yang resmi bergabung dengan FAO pada tahun 1949, Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk dapat memimpin berbagai komite kerja penting terhadap komoditi pangan. Kebijakan FAO diadaptasi oleh Pemerintah Indonesia dengan merumuskan Undang – Undang Pangan No. 7 Tahun 1996 yang menjabarkan dalam 3 poin penting yaitu Ketersediaan, Aksesibilitas, dan Keamanan Pangan. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 01 Tahun 2018 Tentang ketentuan Ekspor dan Impor Beras juga menjelaskan Impor beras untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG setelah mendapatkan persetujuan menteri. PERUM BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan, sebagai Perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintahan, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga,

menyalurkan beras untuk bantuan sosial (bansos) dan pengelolaan stock pangan (BULOG, 2017).

Berdasarkan data yang dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau 5 tahun belakangan Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan yang sangat amat jauh, mulai dari jumlah produksi beras maupun luas hasil panen, pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan cara melakukan impor beras melalui PERUM BULOG.

Dibawah ini adalah gambar yang menampilkan grafik jumlah produksi beras di Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 tahun belakangan, periode 2018 – 2022.

Gambar 1.2 Grafik Jumlah Produksi Beras di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 - 2022



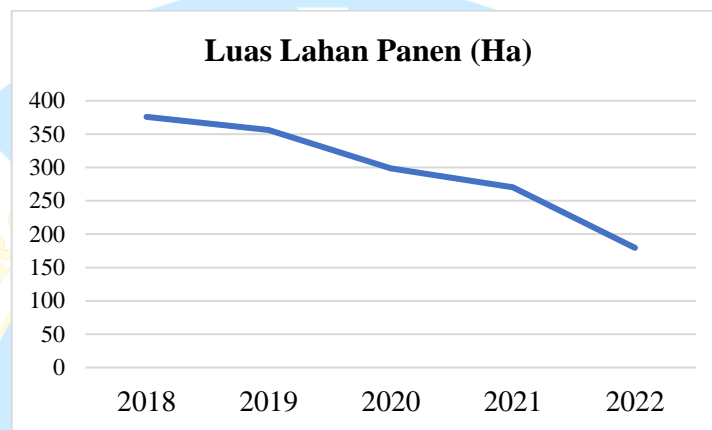
Sumber : Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, 2022

Berdasarkan grafik diatas, terkait Jumlah Produksi Beras di Kepulauan Riau yang didapatkan datanya dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat menurunnya jumlah produksi beras, mulai dari tahun 2018 dengan jumlah 624,48 Ton, di tahun 2019 dengan jumlah 655,15 Ton, di tahun 2020 dengan jumlah 485,31 Ton, di tahun 2021 dengan jumlah 489,29 Ton dan tahun 2022 dengan jumlah terendah yaitu 290,07 Ton. Hal tersebut terjadi juga

dikarenakan luas panen yang semakin tahun semakin menyusutnya luas lahan panen.

Dibawah ini adalah gambar yang menampilkan grafik jumlah luas lahan panen di Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 tahun belakangan, periode 2018 – 2022.

Gambar 1.3 Grafik Jumlah Luas Hasil Panen di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018 - 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, 2022

Berdasarkan grafik diatas, terkait Luas Lahan Panen di Kepulauan Riau yang didapatkan datanya dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat menurunnya Luas Lahan Panen, mulai dari tahun 2018 dengan luas 375,87 Ha, di tahun 2019 dengan luas 356,27, di tahun 2020 dengan luas 298,52 Ha, di tahun 2021 dengan luas 270,16 Ha dan tahun 2022 dengan luas paling kecil yaitu 179,48 Ha.

Provinsi Kepulauan Riau menjaga kestabilan harga beras dengan cara mengimpor melalui PERUM BULOG sebagai instansi yang memonopoli perdagangan bahan pokok di Indonesia dan bergantung pada perdagangan internasional sebagai perwujudan ketahanan pangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana PERUM BULOG Subdivre Tanjungpinang melakukan impor beras untuk mencapai ketahanan pangan nasional di Provinsi Kepulauan Riau ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan impor beras yang dilakukan oleh PERUM BULOG Subdivre Tanjungpinang untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dari penelitian ini, nantinya diharapkan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi penulis sebagai acuan dalam perbandingan antara praktek dan juga teori yang telah diterapkan di penelitian ini agar dapat di terapkan untuk kedepannya.
- b. Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah bahan bacaan bagi mahasiswa/i maupun pembaca lainnya khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis penelitian mengenai penanganan PERUM BULOG dalam impor beras di Kepulauan Riau tahun 2018 - 2022 dapat bermanfaat bagi peneliti yaitu menamabah ilmu pengetahuan dan mendapatkan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah.
- b. Manfaat praktis untuk pihak terkait dalam penelitian mengenai impor beras oleh PERUM BULOG di Kepulauan Riau tahun 2018 - 2022 diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan diambil tindakan oleh pihak – pihak terkait permasalahan impor beras di Kepulauan Riau,